

**IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA SEBAGAI UPAYA
MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI KELURAHAN
PEGIRIAN KOTA SURABAYA**

Abdur Rouf

Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
roupabdurr@gmail.com

Anggraeni Pupaningtyas

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggraenypuspa@untag-ac.id

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Program padat karya merupakan suatu usaha strategis sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang telah menjadi fokus dalam berbagai kebijakan pemerintah. Program ini bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi tenaga kerja tidak terampil melalui proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Dengan melibatkan komunitas lokal dan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, harapan pada program padat karya bisa menciptakan kesempatan kerja jangka pendek akan tetapi juga bisa meningkatkan keterampilan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja. Hasil dari program ini menunjukkan penurunan signifikan dalam angka pengangguran di wilayah-wilayah yang diimplementasikan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Namun demikian, keberhasilan program padat karya sangat bergantung pada perencanaan yang tepat, pengawasan ketat, dan komitmen kuat dari semua pihak terkait.

Kata Kunci: *Implementasi, Padat Karya, Pengangguran*

ABSTRACT

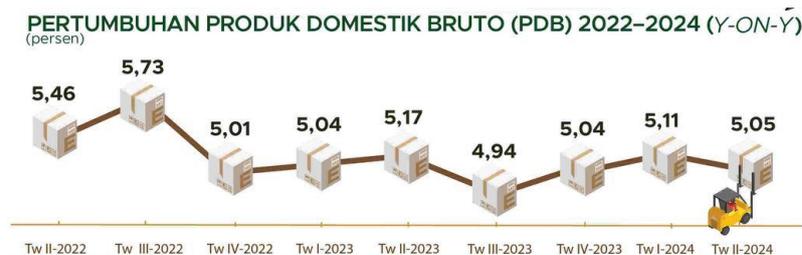
The labour-intensive programme is a strategic effort to reduce poverty and unemployment that has been the focus of many government policies. The programme aims to provide temporary employment for unskilled labour through infrastructure projects and other productive activities. By involving local communities and utilising available human resources, the hope is that the labour-intensive programme will create short-term employment opportunities but also

improve workers' competitiveness skills in the labour market. The results of the programme show a significant reduction in unemployment in the implemented areas, as well as a positive impact on the local economy. However, the success of labour-intensive programmes relies heavily on proper planning, close supervision, and strong commitment from all relevant parties.

Keywords: *Implementation, Labour Intensive, Unemployment*

A. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan ketidakseimbangan pasar keuangan. Berdasarkan rilis data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia Yang terjadi di Triwulan II Tahun 2024 mencapai sekitar 5,05 persen (*year on year/yoy*) yang didominasi oleh permintaan domestik yang kuat melalui dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ekonomi Indonesia secara spasial menunjukkan pertumbuhan positif di semua wilayah. (BPS, 2024)



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Domestik Bruto Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Menurut Kemnaker, Usia pada angka 15 tahun merupakan usia yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Berdasarkan data kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2021 – 2023 menurut Kemnaker pada Februari 2024, Sebanyak 7,56 juta orang Jumlah angkatan kerja di Indonesia naik atau meningkat sebesar 5,39% Mulai dari tahun 2021 s.d 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja di Indonesia semakin bertambah ketersediaannya. (Kemnaker, 2024)

Sedangkan dari pembagian kegiatan Angkatan kerja terbagi menjadi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2023, sebanyak 140 juta jiwa yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau tidak, jumlah tersebut meningkat sekitar 8,8 juta orang atau sekitar 6,71 persen mulai dari 2021-2023.



Gambar 1. 2 Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2021-2023
Sumber: Kementerian ketenagakerjaan 2023

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur mencatatkan perbaikan, tantangan dalam penyerapan tenaga kerja tetap menjadi perhatian, seperti kota-kota besar contohnya Surabaya. Pemerintah kota Surabaya sangat focus dalam penganggulangan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran salah satunya melalui Program Padat Karya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 menjelaskan bahwa pendekatan pemulihan ekonomi lokal dilakukan melalui penyerapan tenaga kerja dengan pembangunan Rumah Padat Karya (Wahyudi et al., 2016).

Menurut Teguh Dartanto, Padat Karya atau *Cash for Work* merupakan pekerjaan publik, seperti pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan sanitasi lingkungan, kegiatan penghijauan, sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah (Dartanto et al., 2019). Pengembangan program padat karya sangat tepat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tidak berkerampilan menurut Habibie. Program ini menekankan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Padat Karya, diharapkan masyarakat desa dapat memperoleh penghasilan tambahan dan daya beli yang lebih kuat. Skema padat karya memungkinkan penyerapan tenaga kerja secara langsung dan pembayaran honorarium harian/mingguan, sehingga bisa memberikan beberapa manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Seiring dengan upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya, penerapan program Padat Karya di Kelurahan Pegirian dirasa sangat penting. Program ini pada tujuannya hanya untuk memperberdayakan masyarakat yang penghasilannya masih rendah dengan melalui pemanfaatan potensi lokal dan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan melibatkan warga dalam kegiatan produktif, diharapkan program ini tidak juga bisa menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih kompetitif di pasar kerja. Selain itu, implementasi program Padat Karya di Kelurahan Pegirian diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal dan menciptakan stabilitas sosial di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang implementasi program Padat Karya di lingkungan masyarakat Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya. Penelitian ini berjudul **“Implementasi Program Padat Karya Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya.”**

B. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut penjelasan Carl Freadrich bahwasannya “Kebijakan publik yaitu alur sebuah kegiatan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut direkomendasikan supaya berguna dalam mengatasinya untuk bisa mencapai tujuan yang dimaskud”. Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan penjelasan tentang kebijakan publik yaitu “Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat” Sementara itu dijelaskan juga yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung penjelasan mengenai “*whatever goverment choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik yaitu apa saja yang ditentukan oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

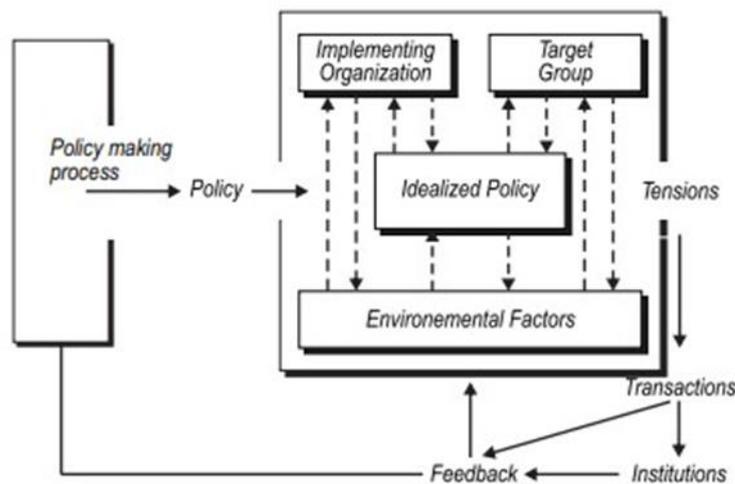
Implementasi kebijakan publik adalah sebuah Proses administratif yang direncanakan setelah kebijakan disetujui. Tahapan ini berada di antara penyusunan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengikuti logika top-down, yang berarti menguraikan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang konkrit atau mikro. Sebaliknya, formulasi kebijakan mengikuti logika bottom-up, dimulai dengan pemetaan kebutuhan publik atau penyesuaian dengan tuntutan lingkungan, diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif solusi, lalu diusulkan untuk disahkan.

Pada dasarnya, implementasi kebijakan yaitu suatu cara untuk memastikan kebijakan bisa mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat beberapa langkah, yaitu seperti langsung melaksanakan kebijakan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan. Kebijakan publik yang berbentuk undang-undang atau Peraturan Daerah memerlukan kebijakan penjelas, biasanya disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat dijalankan langsung meliputi Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya (Riant 2004).

Model Implementasi Kebijakan Adam Smith

Suatu implementasi kebijakan publik akan lebih gampang untuk dimengerti oleh masyarakat umum apabila dalam proses pengaplikasiannya dilakukan dengan kerangka pikiran dan menggunakan beberapa model. Suatu model yang diterapkan secara tidak langsung akan dapat memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat umum dengan sangat jelas dan lengkap terkait dengan objek, situasi atau proses yang sedang dijalankan atau diterapkan.

Adapun model dari implementasi kebijakan publik yang digunakan pada penelitian ini adalah model adam smith yang mana model tersebut mempunyai beberapa variabel yaitu 1. Kebijakan yang diidealkan yaitu bagaimana kebijakan sebuah program berjalan dengan ideal mengikuti standart yang ada; 2. kelompok sasaran yaitu mereka orang- orang berdampak langsung pada kebijakan yang sudah di tetapkan bagaiman kebijakan tesebut bisa tepat; (3) *implementing organization*, yaitu pihak organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah pada implementasi kebijakan; (4) *environmental factor*, yaitu sebuah faktor mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik (Tachjan, 2006). Model Implementasi Kebijakan menurut Adam Smith ini dapat dilihat pada gambar yang akan disajikan dibawah ini:



Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Adam Smith

Pengertian Program Padat Karya

Program padat karya hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah maraknya pengangguran yang masih menjadi momok di Indonesia, program ini bagaikan angin segar yang memberikan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.

Program padat karya merupakan strategi pemerintah yang difokuskan pada penyediaan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, yang berarti membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan modal. Kegiatan dalam program ini umumnya melibatkan berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, penataan lingkungan, pengembangan desa, dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program padat karya biasanya langsung berkolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas program dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Manfaat program padat karya tidak hanya terbatas pada pengurangan pengangguran. Masyarakat yang terlibat dalam program ini mendapatkan

penghasilan dari pa yang sudah mereka terapkan, sehingga mereka bisa mengembangkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam membangun infrastruktur dan menata lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip Pelaksanaan Program Padat Karya

Program padat karya merupakan inisiatif yang dirancang untuk menciptakan lapangan kerja sambil membangun atau memperbaiki infrastruktur yang penting bagi masyarakat. Menurut Bappenas (2016), prinsip utama dari program padat karya adalah menciptakan manfaat ganda: pertama, dengan memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan, dan kedua, dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Penerapan prinsip ini didasarkan pada konsep bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya merupakan investasi fisik semata, tetapi juga investasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan teori ekonomi pembangunan, investasi dalam infrastruktur dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2006). Prinsip ini juga mencerminkan pendekatan inklusif yang dianjurkan oleh Sen (1999), di mana pembangunan seharusnya memperhitungkan dan menguntungkan semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan.

Selain itu, prinsip pelaksanaan program padat karya juga melibatkan aspek pengelolaan yang efektif dan transparan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program ini digunakan secara tepat, serta untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan publik (OECD, 2005).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jeni dekstraktif (Sugiyono, 2013). Penelitian ini berfokus pada penelitian di lapangan untuk mencari dan mempelajari secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai implementasi program Padat Karya di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya.

Penelitian ini mencari data yang bersumber dari lapangan, yaitu dari masyarakat dan aparatur Kelurahan Pegirian serta dinas sosial. Data kualitatif yang diperoleh bisa memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka dengan pemanfaatan literatur (kepuustakaan) berupa buku, catatan, dan hasil penelitian sebelumnya tentang Program Padat Karya.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi program Padat Karya dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kelurahan Pegirian kota Surabaya dengan mengacu variabel teori Adam Smith seperti:

1. Kebijakan yang diidealkan (*dealized Policy*)
2. Kelompok Sasaran (*Target Groups*)
3. Badan Pelaksana (*Implementing Organization*)
4. Unsur – unsur Lingkungan (*Environmental Factors*)

Pada Penelitian ini berupaya memahami seluruh proses pelaksanaan program Padat karya termasuk peran serta masyarakat, dukungan dari aparat kelurahan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi selama implementasi. Dengan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai cara implementasi program Padat Karya terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pegirian.

Lokasi penelitian skripsi berikut akan dilaksanakan di Kelurahan Pegirian, yang terletak di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur. Kelurahan Pegirian sebagai fokus lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni mengurangi tingkat pengangguran melalui program Padat Karya. Surabaya, sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan urbanisasi dan pengangguran yang cukup signifikan, sehingga menyediakan konteks yang sesuai untuk menganalisis efektivitas intervensi pemerintah dalam bentuk program Padat Karya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada teori dengan beberapa model yang dikemukakan oleh Adam Smith yang memandang bahwa implementasi sebagai proses dari kebijakan publik dari perspektif perubahan sosial dan bertujuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Terdapat 4 landasan variabel yang menjadi acuan dasar pemikiran dalam skripsi ini yaitu kebijakan yang ideal yang merupakan cara bagaimana kebijakan dijalankan sesuai prosedur yang ada supaya tujuannya bisa menargetkan suatu kelompok untuk berpartisipasi. Landasan kedua yaitu sasaran kelompok yang merupakan bagian dari pemangku kegiatan yang diharapkan dapat menerapkan pola interaksi sesuai harapan pemurus kebijakan. Landasan ketiga merupakan organisasi pengimplementasi yang diharapkan badan-badan pelaksana atau pihak yang terkait dapat bertanggung jawab atas pengimplementasian kebijakan. Landasan keempat yaitu faktor lingkungan yang diharapkan menjadi unsur-unsur penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan program padat karya dalam berbagai aspek seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Adapun pembahasan terkait 4 landasan teori pendekatan (*Bottom-Up*) oleh Smith di atas terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan yang diidealkan

Keberhasilan suatu kegiatan merupakan dengan adanya kebijakan yang sudah sesuai dengan visi suatu daerah tersebut. Sehingga diperlukan tujuan yang jelas agar diperoleh kebijakan yang ideal. Kebijakan yang kurang ideal menyebabkan program yang dilaksanakan menjadi kurang efektif. Agar program padat karya berhasil, kebijakan perlu dirancang secara tepat dan mempertimbangkan kebutuhan lokal, serta keberlanjutan ekonomi agar dampak positifnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kebijakan yang ideal dalam program padat karya terkait penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sudah diatur dalam kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa “Dalam rangka memulihkan perekonomian daerah, mempercepat menangani

penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Kota Surabaya Program Padat menciptakan sebuah program yaitu program Karya yang melibatkan keluarga miskin dalam pelaksanaan pembangunan kota tersebut”.

Diharapkan dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa membuat masyarakat berpartisipasi aktif, yang menjadi fokus utama yaitu keluarga miskin dan pengangguran, dalam pelaksanaan program padat karya sehingga mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang berkebutuhan. Dengan adanya Kebijakan yang ideal ini juga diharapkan program padat karya ini bisa menjadi solusi keberlanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendukung fasilitas warga dalam jangka panjang sehingga masyarakat menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Teori kebijakan yang diidealkan diharapkan dapat memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong yang merupakan kunci dari kebijakan yang diidealkan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu fokus menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan di daerah tersebut sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan yang menjadi salah satu bagian penting dalam kebijakan yang ideal yang berorientasi pada hasil yang positif bagi masyarakat.

Dilihat dari hasil wawancara lapangan kepada beberapa informan yang sudah dilaksanakan oleh penulis bisa disimpulkan bahwasannya keberhasilan program padat karya menurut teori adam smith pada fokus kebijakan yang di idealkan bahwasannya pelaksanaan implementasi program padat karya sudah sesuai dengan tujuan Wali Kota Surabaya dengan Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2022 dan Undang Undang Nomor 83 Tahun 2023 yaitu memulihkan perekonomian rakyat. Dengan adanya program padat karya masyarakat di Kelurahan Pegirian sudah sangat terbantu dalam perekonomiannya.

2. Sasaran Kelompok

Sasaran kelompok menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program padat karya karena mencakup berbagai pihak yang diharapkan oleh perumus kebijakan dapat berpartisipasi aktif untuk meningkatkan keberhasilan program tersebut. Dalam hal ini, beberapa kelompok sasaran yang terlibat dalam program padat karya di Kelurahan Pegirian adalah Keluarga Miskin. Sasaran kelompok ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota Surabaya yaitu untuk “memanfaatkan sebuah sumberdaya lokal dan memfokuskan keluarga miskin bisa melaksanakan program padat karya”. Dengan melibatkan sasaran kelompok ini, Program Padat Karya diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta tercipta pola interaksi sinergis, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif .

Dilihat dari hasil wawancara lapangan kepada beberapa informan yang sudah dilaksanakan oleh penulis bisa disimpulkan bahwasannya keberhasilan program padat karya menurut teori adam smith pada Fokus Sasaran kelompok (Target Grup) bahwasannya pelaksanaan implementasi program padat karya sudah sesuai dan tetap sasaran yaitu warga miskin, pengangguran dan menurut Bu Sila sebagai Staff

Kasie Kesejahteraan Rakyat bahwa untuk target sasaran kelompok kita survei terlebih dahulu menurut data dan kita pilih sesuai dengan umur bahwasannya untuk bisa Mengikuti Program bisa diikuti bagi masyarakat yang masih Berumur 18 sampai dengan 60 tahun dan saat ini sudah berjalan 23 orang yang sudah mengikuti Program padat karya.

3. Organisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana berperan penting dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek program dijalankan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Organisasi pelaksana juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Organisasi pelaksana juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan program dalam berjalan sesuai rencana.

Keberhasilan program padat karya bergantung pada efektivitas organisasi pelaksana dalam mengkoordinasikan sumber daya, pengelolaan anggaran serta melibatkan masyarakat daerah. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi yang baik dari organisasi pelaksana, program padat karya dapat mencapai tujuannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, membangkitkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan organisasi pelaksana tidak hanya menjadi kunci keberhasilan program padat karya, tetapi juga dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dilihat dari hasil wawancara lapangan kepada beberapa informan yang sudah dilaksanakan oleh penulis bisa disimpulkan bahwasannya keberhasilan program padat karya menurut teori adam smith pada fokus kebijakan yang di idealkan bahwasannya pelaksanaan implementasi program padat karya smasih belum sesuai dikarenakan setelah mendapatkan program padat karya makin lama dukungan para pelaksana menurun sehingga jarang adanya pantauan terhadap program yang sudah diberikan apakah terus berjalan atau tidak.

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari faktor lingkungan adalah dari segi aspek sosial dan juga ekonomi. Hal ini menjadi pendukung penting dalam berjalannya program padat karya dari sumber daya sosial dan juga ekonomi.

Dari segi sosial, dinamika masyarakat sangat berpengaruh terhadap bentuk partisipasi dan keberhasilan program. Lingkungan yang memadai dalam pelaksanaan program berpengaruh penting dalam keberhasilan program. Nilai-nilai soisal seperti gotong royong dan solidaritas dapat memperkuat kerjasama antar individu dan kelompok. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap sesama dapat menghambat berjalannya program dan dapat mengurangi efektivitas program.

Dalam aspek ekonomi, dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai dari pemerintah, dapat meningkatkan efektifitas program padat karya, Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga menyediakan peluang usaha baru.

Dilihat dari hasil wawancara lapangan kepada beberapa informan yang sudah dilaksanakan oleh penulis bisa disimpulkan bahwasannya keberhasilan program padat karya menurut teori adam smith pada fokus kebijakan yang di idealkan

bahwasannya pelaksanaan implementasi program padat karya sudah sesuai dengan tujuannya namun untuk keberhasilan pada fokus lingkungan, sosial dan ekonomi tergantung dengan mereka sendiri mampukah dengan apa yang diberikan oleh pihak kelurahan dikembangkan lebih baik.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dijelaskan di pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mplementasi program padat karya merupakan langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah kota surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja sementara, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau yang terdampak krisis ekonomi.

Maka dari itu implementasi program padat karya sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kelurahan pegirian kota surabaya sudah cukup berhasil dan sudah berjalan sekitar 23 orang yang sudah mengikuti Program Padat Karya meskipun ada beberapa hal yang kurang maksimal dari pelaksana dan penerima program padat karya. Namun tidak memungkiri bahwa suatu program tidak memungkinkan untuk berhasil 100%. namun dari beberapa bukti dari informan yang menerima program tersebut banyak yang berterimakasih dan bersyukur dengan adanya program padat karya yang sudah ada sampai saat ini mereka mendapatkan pekerjaan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahendra, D. A., & Rahaju, T. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DI KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(2), 14-29.
- Pawening, A. S., & Lestari, P. (2020). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(5).
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739-753.
- Dartanto, T., Gitaharie, B. Y., Handayani, D., & Shauki, E. R. (2019). Challenges of the global economy: Some Indonesian issues. In *Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. (*No Title*).